

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perang telah menjadi bagian kelam dari sejarah dunia yang memengaruhi berbagai bangsa dan peradaban. Sepanjang sejarah, dunia ini telah dilanda oleh banyak perang besar yang membawa dampak luar biasa, baik dari segi politik, ekonomi, maupun kemanusiaan. Di era modern ini, ancaman perang nuklir, terorisme, dan perang siber menjadi tantangan baru yang dihadapi umat manusia. Upaya untuk menjaga perdamaian internasional dilakukan melalui diplomasi, perjanjian damai, dan peran aktif lembaga-lembaga global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, perdamaian sejati hanya dapat dicapai jika bangsa-bangsa di dunia berkomitmen untuk menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan kerja sama, bukan melalui kekerasan dan senjata. Konflik bersenjata internasional sering muncul ketika upaya diplomasi antara dua atau lebih negara gagal mencapai kesepakatan.

Perang merupakan sebuah peristiwa yang telah ada sejak awal peradaban manusia di bumi. Perang muncul sebagai akibat dari interaksi dan hubungan antar manusia itu sendiri. Perang adalah tindakan atau aksi, baik secara fisik maupun non fisik, yang dilakukan untuk memperebutkan sesuatu yang dianggap penting oleh pihak-pihak yang terlibat. Dalam arti yang lebih sempit, perang biasanya terjadi karena adanya konflik antara dua pihak yang tidak mau berkompromi terkait suatu kepentingan, baik itu kepentingan politik, ekonomi, sosial, maupun lainnya. Akibatnya, kedua kelompok tersebut menyatakan perang dengan tujuan menyelesaikan masalah atau konflik tersebut, tetapi justru menyebabkan rasa sakit dan kerugian besar bagi kedua belah pihak yang terlibat. Perang sering kali membawa dampak buruk yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Konflik ini menyebabkan banyak korban luka-

luka, bahkan kehilangan nyawa, serta kerugian materiil yang besar. Kondisi seperti ini sangat tidak diharapkan oleh penduduk sipil, terutama mereka yang tinggal di wilayah konflik.

Isu kemanusiaan merupakan salah satu topik yang kerap dibahas dalam hubungan internasional, terutama terkait dengan krisis pengungsi yang saat ini menjadi sorotan utama masyarakat global. Meluasnya kekerasan dan sikap apatis dari sejumlah negara telah menjadi isu penting dalam era demokrasi, yang seharusnya mengedepankan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) (Nicholson & Kumin, 2017). Pengungsi dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya karena ketakutan yang berkelanjutan, yang disebabkan oleh perbedaan ras, agama, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik. Pengungsi yang terpaksa meninggalkan negara mereka rentan terhadap situasi berbahaya yang mengancam keselamatan mereka. Masalah pengungsi dan perpindahan penduduk antarnegara merupakan tantangan yang sulit dihadapi masyarakat dunia saat ini. Untuk menjamin hak dan kewajiban pengungsi, diperlukan perjanjian internasional. Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk konvensi tentang status pengungsi pada tahun 1951, yang mulai berlaku pada 14 April 1954. Untuk mendukung pelaksanaan konvensi ini, PBB juga mendirikan badan khusus bernama *United Nations High Commissioner for Refugees* (Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi) yang bertugas mengawasi dan mengatur perlindungan bagi pengungsi melalui kerja sama dengan negara-negara yang terikat oleh konvensi tersebut. Perlindungan yang diberikan kepada pengungsi tidak hanya bertujuan untuk meringankan penderitaan mereka, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak dan kebebasan dasar yang sangat diperlukan sesuai dengan situasi mereka (Koesparmono, 2007).

Konflik antara Rusia dan Ukraina sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 2014, berawal dari ketegangan politik di Ukraina. Ketegangan ini memicu kemunculan kelompok separatis di wilayah timur Ukraina, yang menginginkan Donetsk dan Luhansk memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia. Kehadiran kelompok separatis tersebut membuat

pemerintah Ukraina khawatir, sehingga mereka mengirimkan pasukan militer ke Donetsk dan Luhansk, yang akhirnya memicu pecahnya perang di wilayah tersebut (Jumarlin, 2017).

Ketegangan antara Rusia dan Ukraina kembali meningkat pada akhir 2021, tepatnya pada November, ketika sekitar 100.000 tentara Rusia, bersama dengan tank dan peralatan militer lainnya yang terdeteksi melalui citra satelit, dikerahkan di dekat perbatasan. Intelijen Barat memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan besar akan menyerang Ukraina dalam waktu dekat. Langkah Rusia mengerahkan pasukannya di perbatasan diduga merupakan upaya Presiden Rusia untuk menuntut penghentian aktivitas militer NATO di Ukraina dan Eropa Timur. Rusia juga menegaskan larangannya terhadap NATO untuk menerima Ukraina atau negara-negara bekas Uni Soviet lainnya sebagai anggota. Selama tiga dekade terakhir, ekspansi NATO telah berkembang pesat dan kini mendekati perbatasan Rusia. Untuk mencegah Ukraina atau negara bekas Uni Soviet lainnya bergabung dengan NATO, Vladimir Putin segera mengambil langkah pencegahan (Adha, 2022).

Meski pada tahun 2022 Rusia dan Ukraina terlibat perang, dulunya hubungan mereka sangat dekat. Ukraina pernah menjadi negara yang sangat pro-Rusia, terbukti dari sejarah yang menunjukkan bahwa selama lebih dari 73 tahun, Ukraina setia menjadi bagian dari Uni Soviet. Selain itu, Ukraina banyak berkontribusi pada perkembangan Uni Soviet dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi. Saking pentingnya kontribusi negara ini, Ukraina berhasil menjadi salah satu dari tiga pendiri utama *Commonwealth of Independent States*. *Commonwealth of Independent States* (CIS) adalah suatu persemakmuran yang terdiri dari negara-negara merdeka yang dibentuk oleh Rusia, Ukraina, Belarusia, dan beberapa negara bekas Uni Soviet lainnya. Pembentukan ini merupakan hasil kesepakatan untuk membubarkan Uni Soviet, yang ditandai dengan mundurnya Mikhail Gorbachev, pemimpin terakhir Uni Soviet. CIS dibentuk melalui Piagam CIS yang ditandatangani oleh para pemimpin negara

anggota, termasuk Boris Yeltsin, Presiden pertama Rusia, dan Leonid Kravchuk, Presiden pertama Ukraina.

Perang adalah salah satu metode untuk menyelesaikan konflik antarnegara, tetapi juga merupakan pilihan terakhir setelah semua upaya lain gagal. Pendekatan ini diambil Rusia untuk mengatasi masalahnya dengan Ukraina, yang pada gilirannya menjadi peringatan akan bahaya dan mengancam keselamatan rakyat Ukraina. Kondisi ini menciptakan masalah bagi rakyat Ukraina, mendorong mereka untuk meninggalkan negara mereka demi mencari suaka dan menyelamatkan diri dari perang. Ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh peperangan membuat mereka mencari perlindungan dan rasa aman di negara lain. Salah satu negara yang paling banyak menjadi tujuan pencarian suaka adalah Rusia, yang merupakan pihak yang berperang melawan Ukraina. Terlalu banyak intervensi dan campur tangan Rusia dalam urusan internal Ukraina membuat Ukraina merasa terancam kedaulatannya, sehingga muncul keinginan untuk bergabung dengan NATO, karena sulit bagi Ukraina untuk bersaing dengan kekuatan militer Rusia. Ketegangan antara kedua negara mencapai puncaknya ketika Putin mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis pro-Rusia di Ukraina timur, yaitu Donetsk dan Luhansk, yang dia sampaikan dalam pidatonya di televisi pemerintah. Dalam pidatonya, Putin menyatakan bahwa negara-negara Barat telah lama mengkritik masalah keamanan Rusia dengan memindahkan NATO ke arah timur dan mendekatkan infrastruktur militer ke perbatasan Rusia. Puncaknya, Putin menyerukan invasi ke wilayah Ukraina pada 24 Februari 2022. Para pihak yang terlibat dalam perang harus mematuhi ketentuan global mengenai perang, seperti Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa, yang menegaskan bahwa hanya anggota pasukan musuh yang boleh dibunuh, bukan wartawan atau warga sipil, termasuk pengungsi. Hal ini diatur dalam Pasal 14 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 yang berkaitan dengan pengungsi.

Polandia adalah negara terbesar di Eropa Tengah, dengan luas wilayah 312.685 km<sup>2</sup> (1,4% dari total luas Eropa) dan berbatasan langsung dengan Ukraina di sebelah timur. Oleh karena itu, sebagian besar warga Ukraina yang terdampak perang melarikan diri ke Polandia. Menurut catatan UNHCR, lebih dari setengah pengungsi Ukraina melarikan diri ke Polandia, negara yang berbatasan langsung dengan Ukraina. Selain itu, ada juga yang menuju Hungaria, Moldova, Rumania, dan Slovakia. Mengutip dari CNN, setelah satu bulan sejak Rusia menyerang Ukraina, lebih dari 500 pengungsi tiba di Belarusia, sekitar 57.000 di Rumania, 90.000 di Slovakia, 103.000 di Moldova, 145.000 di Hungaria, 149.000 di Rusia, dan Polandia menjadi tujuan utama dengan total sekitar 650.000 pengungsi.

Salah satu alasan utama masyarakat Ukraina memilih mengungsi ke Polandia adalah karena faktor kedekatan geografis, kebijakan penerimaan pengungsi oleh pemerintah Polandia, bantuan kemanusiaan, serta empati yang ditunjukkan oleh warga Polandia. Fenomena ini tidak hanya disebabkan oleh faktor geografis (perbatasan bersama) tetapi juga karena tradisi migrasi (tenaga kerja) yang sudah berlangsung lama antara Ukraina dan Polandia. Di sisi lain, sebagai anggota Uni Eropa, Polandia memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku di Uni Eropa, termasuk kesepakatan untuk menerima kuota pengungsi.

Namun, masuknya pengungsi perang dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya menimbulkan pertanyaan mengenai perkembangan dan tantangan yang akan dihadapi terkait keberadaan warga negara Ukraina di Polandia di masa depan. Kontribusi ini berupaya memperkirakan jumlah imigran asal Ukraina di masa mendatang di negara tersebut serta mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul. Upaya ini, tentu saja, penuh dengan ketidakpastian. Kedatangan para pengungsi menimbulkan berbagai masalah baru bagi pemerintah Polandia, mulai dari penyediaan air bersih, tempat tinggal yang layak dan aman, ketersediaan pangan, layanan kesehatan, keberlanjutan pendidikan, hingga akses hukum serta perlindungan sosial dan psikologis bagi pengungsi yang mengalami trauma akibat konflik.

Permasalahan lain yang muncul mencakup kondisi kesehatan fisik dan mental para pengungsi Ukraina.

Berdasarkan pemaparan diatas, Dampak Perang Rusia-Ukraina Terhadap Pengungsi Ukraina di Polandia dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi telah memaksa banyak warga Ukraina untuk meninggalkan negaranya dan mencari perlindungan di negara-negara tetangga. Sebagian besar pengungsi Ukraina memilih melarikan diri ke negara-negara Eropa, dan Polandia, sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Ukraina, menjadi tujuan utama bagi para pengungsi tersebut.

#### **A. Batasan dan Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi ruang lingkup kajian hanya pada topik yang sesuai dengan judul penelitian, yaitu Dampak Perang Rusia-Ukraina Terhadap Pengungsi Ukraina di Polandia. Dengan begitu, peneliti kemudian merumuskan dua rumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Polandia terhadap pengungsi Ukraina?
2. Bagaimana dampak perang Rusia-Ukraina terhadap kebijakan pemerintah Polandia mengenai pengungsi Ukraina?

#### **B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah Polandia terhadap pengungsi Ukraina.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana dampak perang Rusia-Ukraina terhadap kebijakan pemerintah Polandia mengenai pengungsi Ukraina.

Pada penelitian ini peneliti berharap dapat memiliki kegunaan serta manfaat agar sekiranya menjadi bacaan dan sumber referensi bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang dampak perang Rusia-Ukraina terhadap pengungsi Ukraina di Polandia.

### **C. Kerangka Konsep**

Pada penelitian yang akan disusun oleh peneliti nantinya akan menggunakan konsep pengungsi dan *Human Security*. konsep ini akan dijadikan sebagai tolak ukur dampak perang Rusia-Ukraina terhadap pengungsi Ukraina di Polandia.

#### **a. Pengungsi dalam Hubungan Internasional**

Pengungsi adalah individu yang kehilangan perlindungan dasar dari negaranya akibat adanya kerusakan hubungan antara negara dan warga negara. Ia menekankan bahwa status pengungsi tidak hanya terbatas pada mereka yang melarikan diri dari penganiayaan langsung, tetapi juga pada mereka yang hidup dalam kondisi yang membuat perlindungan negara tidak efektif (Shacknove, 1985). Menurut Barbara Harrell-Bond, pengungsi sebagai individu yang terpaksa meninggalkan negara asal mereka karena ancaman terhadap keselamatan mereka, baik itu akibat konflik bersenjata, penindasan politik, atau pelanggaran hak asasi manusia. Ia menekankan bahwa pengungsi bukan hanya sekadar statistik dalam laporan internasional, tetapi individu dengan pengalaman dan kebutuhan spesifik (Harrell-Bond, 1989)

Pengungsi adalah produk dari ketidakstabilan politik internasional dan konflik domestik. Ia menyoroti bagaimana perubahan geopolitik sering kali memicu perpindahan massal penduduk, membuat isu pengungsi tidak hanya menjadi masalah nasional tetapi juga global (Loescher, 1993). Pengungsi bukan hanya korban dari kekerasan dan penganiayaan, tetapi juga korban dari ketiadaan status kewarganegaraan yang membuat mereka kehilangan perlindungan hukum dan hak politik. Perspektif ini menggarisbawahi bahwa status tanpa kewarganegaraan adalah salah satu bentuk paling parah dari ketidakamanan manusia. Arendt menekankan bahwa pengungsi berada dalam situasi di mana mereka kehilangan “hak untuk

memiliki hak,” yang berarti mereka kehilangan akses pada hak-hak dasar manusia karena status mereka (Arendt, 1951).

Pengungsi sebagai individu yang dipaksa meninggalkan negaranya bukan hanya karena ancaman langsung kekerasan atau penganiayaan, tetapi juga akibat kegagalan pemerintahan dalam menyediakan kebutuhan dasar seperti keamanan dan kesejahteraan. Perspektif ini memperluas pemahaman tradisional tentang pengungsi, yang sering kali terbatas pada definisi hukum internasional, dengan memasukkan situasi di mana orang melarikan diri karena kondisi ekonomi yang kritis atau kehancuran sosial yang membuat kelangsungan hidup mereka terancam (Betts, 2013).

#### **b. *Human Security* Terkait Pengungsi**

*Human security* terkait pengungsi mencakup perlindungan dari kekerasan langsung (fisik) dan struktural. Mereka menyoroti pentingnya keamanan perempuan dan anak-anak dalam situasi pengungsian, mengingat kelompok ini sering menjadi korban utama eksploitasi (Karim, & Beardsley, 2017). Menurut Edward Newman, pengungsi adalah masalah global yang memerlukan kolaborasi internasional, bukan hanya pendekatan berbasis negara. Dia juga menyoroti bahwa kegagalan dalam memenuhi kebutuhan pengungsi dapat memperburuk ketegangan regional (Newman, 2001).

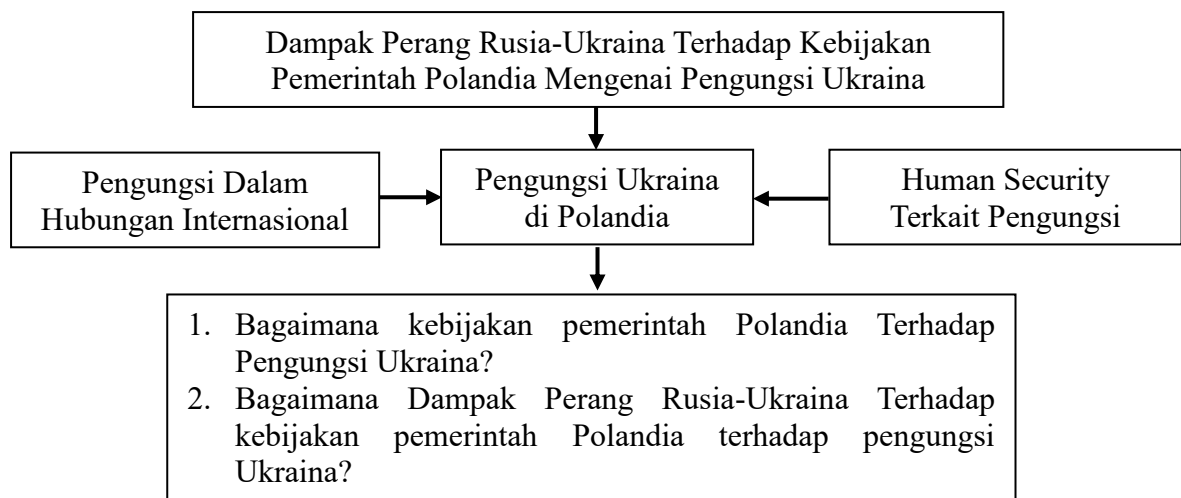
Ancaman terhadap pengungsi bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga ancaman sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, pengungsi sering menghadapi tantangan seperti diskriminasi dan ketidakmampuan untuk berintegrasi dalam masyarakat tuan rumah, yang dapat merusak keamanan pribadi mereka dalam jangka panjang (Buzan, 1991).

Perlindungan terhadap pengungsi memerlukan kebijakan yang mencakup keamanan fisik dan kesejahteraan sosial-ekonomi. Paris menekankan bahwa pengungsi memerlukan dukungan yang terstruktur, termasuk program integrasi yang mengurangi potensi marginalisasi dan konflik dengan masyarakat lokal (Paris, 2001). Sebagai pelopor konsep *human security*,

Mahbub ul Haq menyatakan bahwa ancaman terhadap keamanan manusia, seperti kelaparan, penyakit, dan pengungsian, sering kali lebih berbahaya daripada ancaman militer. Ia mengaitkan kondisi pengungsian dengan kebutuhan akan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (ul Haq, 1995).

#### D. Skema Pembahasan

Peneliti menerapkan pola berpikir dalam menyusun penelitian ini, yang dapat digambarkan dalam bagan berikut.



*Gambar 1. 1 Skema Pembahasan*

#### E. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan beberapa struktur untuk menyusun penelitian ini agar sesuai dengan metode yang diterapkan. Berikut ini akan dijelaskan struktur metode penelitian yang dipakai oleh Peneliti.

##### 1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi pustaka dalam mengumpulkan data kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang pada umumnya berupa informasi kategori substantif yang sulit dinumerasikan dan digunakan dengan melalui studi pustaka terhadap subjek yang diteliti.

## **2. Jenis Data**

Jenis data yang akan digunakan peneliti pada proses penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang sudah ada atau data-data tersebut telah dikumpulkan oleh lembaga serta organisasi penyelidik sebelumnya. Data-data sekunder dapat diperoleh melalui buku, artikel, jurnal, dokumen resmi, Undang-Undang Negara, situs jejaring resmi, serta sumber elektronik yang memuat analisis tentang dampak perang Rusia-Ukraina terhadap pengungsi Ukraina di Polandia.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) yakni dokumen atau catatan dari peristiwa yang telah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya dari seseorang yang tentunya relevan dengan topik yang diangkat oleh peneliti.

## **4. Teknik Analisis Data**

Pendekatan yang digunakan peneliti untuk menganalisis data ialah dengan menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena atau peristiwa secara mendalam tanpa manipulasi atau intervensi peneliti. Penelitian ini berfokus pada deskripsi sistematis dan interpretatif dari data yang dikumpulkan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai situasi atau subjek yang sedang diteliti.

## **B. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam lima bab di mana tiap-tiap babnya akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan pedoman penelitian ilmiah. Berikut ini uraian bab tersebut.

**BAB 1 Pendahuluan** yakni bagian penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, batasan beserta rumusan masalahnya, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep,

metodologi penelitian, serta sistematika dalam penulisan penelitian ini.

**BAB 2 Tinjauan Pustaka** ialah penguraian mengenai konsep serta teori yang digunakan peneliti sebagai tolok ukur dasar analisis. Teori atau konsep yang digunakan peneliti adalah Pengungsi dalam hubungan internasional dan *Human Security* terkait pengungsi.

**BAB 3 Gambaran Umum** akan membahas mengenai dampak perang Rusia-Ukraina Terhadap Pengungsi Ukraina di Polandia.

**BAB 4 Analisis dan Hasil Penelitian** nantinya akan berisikan hasil analisis mengenai kebijakan pemerintah Polandia terhadap pengungsi Ukraina. Peneliti juga akan menjabarkan mengenai dampak perang Rusia-Ukraina terhadap kebijakan pemerintah Polandia mengenai pengungsi Ukraina.

**BAB 5 Kesimpulan** akan berisi rangkuman dari keseluruhan hasil penelitian serta menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya oleh Peneliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengungsi dalam Hubungan Internasional**

Pengungsi adalah individu yang kehilangan perlindungan dasar dari negaranya akibat adanya kerusakan hubungan antara negara dan warga negara. Ia menekankan bahwa status pengungsi tidak hanya terbatas pada mereka yang melarikan diri dari penganiayaan langsung, tetapi juga pada mereka yang hidup dalam kondisi yang membuat perlindungan negara tidak efektif (Shacknove, 1985). Menurut Barbara Harrell-Bond, pengungsi sebagai individu yang terpaksa meninggalkan negara asal mereka karena ancaman terhadap keselamatan mereka, baik itu akibat konflik bersenjata, penindasan politik, atau pelanggaran hak asasi manusia. Ia menekankan bahwa pengungsi bukan hanya sekadar statistik dalam laporan internasional, tetapi individu dengan pengalaman dan kebutuhan spesifik (Harrell-Bond, 1989).

Peningkatan tajam jumlah pengungsi asing saat ini cukup mengejutkan dan memprihatinkan, dan sebagian besar dari mereka berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Umumnya Mereka meninggalkan tempat asal mereka untuk menghindari perlakuan kejam dan penghinaan dari individu tertentu yang sebenarnya melanggar cita-cita kemanusiaan mereka. Pengungsi kategori ini sangat rentan karena negara mereka sendiri tidak memberikan mereka keamanan, dan seringkali pemerintah mereka sendiri yang menganiaya mereka (Simeon, 2010).

Pendekatan konstruktivis dalam studi hubungan internasional menekankan bahwa realitas politik global dibentuk oleh ide, norma, dan identitas bersama para aktor (terutama negara), bukan semata oleh kekuatan material. Struktur sistem internasional (misalnya anarki) bukanlah sifat tetap, tetapi dikonstruksi oleh negara-negara melalui kesepakatan sosial; dengan kata lain, struktur dan kepentingan aktor ditentukan oleh ide bersama, bukan oleh faktor

alamiah (Wendt, 1992). Prinsip ini tercermin dalam dua asumsi utama konstruktivisme, yakni bahwa struktur asosiasi manusia ditentukan terutama oleh ide bersama, serta identitas dan kepentingan aktor dibentuk oleh ide-ide tersebut. Dengan pandangan demikian, realitas politik tidak bersifat objektif dan tetap: identitas nasional, agama, atau norma ideologi suatu masyarakat secara aktif membentuk kebijakan luar negerinya. Misalnya, jika suatu negara mengidentifikasi diri sebagai “negara demokratis liberal”, maka kebijakannya termasuk soal pengungsi akan selaras dengan norma hak asasi manusia, dibandingkan jika negara tersebut menganut identitas nasionalis atau eksklusif.

Tokoh-tokoh konstruktivis lainnya turut menyoroti peran norma dan proses sosial dalam menentukan kebijakan internasional. Norma internasional berfungsi sebagai “*standar perilaku yang sesuai bagi aktor-aktor dengan identitas tertentu*” (misalnya norma kemanusiaan atau perlindungan) yang muncul dan diinternalisasi melalui proses sosial dan politik (Finnemore & Sikkink, 1998). Proses ini dikenal sebagai *norm life-cycle*, di mana gagasan normatif baru (misalnya perlindungan pengungsi) diusung oleh “*norm entrepreneurs*”, kemudian diadopsi secara luas hingga menjadi norma baku dalam tatanan internasional. John Ruggie menambahkan bahwa institusi dan aturan global terbangun berdasarkan pemahaman bersama (*shared understandings*) semacam ini, bukan hanya oleh kepentingan nasional semata. Dengan demikian, konstruktivisme melihat perilaku negara dipandu oleh “logika kecocokan” (*logic of appropriateness*), di mana negara memilih tindakan yang sesuai dengan identitas atau nilai yang diyakini kelompoknya (Ruggie, 1998).

Dalam hubungan internasional, konsep *pengungsi* pada awalnya diabadikan melalui Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. UNHCR menjelaskan bahwa Konvensi 1951 mendefinisikan pengungsi sebagai “orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada di luar negara kebangsaannya dan tidak

menginginkan perlindungan dari negara tersebut” (UNHCR, 2025). Misalnya, Deklarasi Cartagena (1984) di Amerika Latin memperluas konsep pengungsi dengan memasukkan orang-orang yang melarikan diri karena kekerasan umum, agresi asing, atau pelanggaran hak asasi manusia masif. Kendati demikian, definisi 1951 masih menjadi acuan utama dalam hukum internasional, sementara para akademisi terus menyadari keterbatasannya (misalnya tidak mencakup pengungsi iklim atau bencana alam). Pembentukan definisi ini juga mencerminkan konstruksi sosial; status pengungsi adalah produk perjanjian internasional dan konsensus bersama tentang siapa yang layak mendapat perlindungan.

Dari perspektif konstruktivis, sikap dan kebijakan suatu negara terhadap pengungsi sangat dipengaruhi oleh identitas nasional, norma-norma yang diinternalisasi, dan wacana publik. Misalnya, suatu negara yang melihat diri sebagai “pemeluk aturan internasional” cenderung mematuhi norma non-refoulement (larangan pengusiran paksa pengungsi) karena dianggap sesuai dengan identitas tersebut. Sebaliknya, negara dengan identitas yang mengutamakan kedaulatan keras atau kesatuan sosial mungkin mengabaikan norma serupa. Hal ini terlihat dalam studi Firmansyah (2013) yang menunjukkan bahwa Jerman sejak 1948 merumuskan kebijakan penerimaan pengungsi sebagai upaya pertanggungjawaban moral atas kejahatan Holocaust. Artinya, gambar diri Jerman sebagai negara bertanggung jawab mendorong kebijakan terbuka, bukan semata atas pertimbangan ekonomi atau keamanan.

Identitas ini terwujud pula dalam *politik persepsi*. Sebagai contoh kontemporer, respons internasional terhadap krisis pengungsi Ukraina berbeda secara mencolok dibanding Suriah. Nathoo (2023) menemukan bahwa kerangka sosial terhadap identitas pengungsi Ukraina (misalnya kedekatan budaya, narasi “perang di depan rumah kami”) menghasilkan respons yang lebih positif di Eropa, sementara pengungsi Suriah, yang diidentikkan dengan latar agama dan budaya yang berbeda, menghadapi stereotip dan penolakan yang lebih kuat. Dalam konstruktivisme, ini bukan kebetulan; konstruksi sosial dan narasi yang dominan (lihat framing

media atau retorika politik) membentuk apakah kelompok pengungsi dianggap “layak” dibantu. Dengan kata lain, dinamika politik pengungsi ditentukan oleh intersubjektivitas identitas dan norma, bukan hanya oleh kebutuhan praktis atau jumlah yang datang.

Konstruktivisme juga menjelaskan bagaimana norma internasional (seperti norma hak asasi manusia dan kewajiban kemanusiaan) mempengaruhi kebijakan pengungsi. Norma-norma ini diinternalisasi oleh negara-negara melalui proses belajar sosial. Sebagai contoh, prinsip *non-refoulement* (melarang pemulangan paksa) telah menjadi norma yang luas diterima karena kampanye global dan lembaga internasional yang “mengajarkan” perilaku ini kepada negara-negara anggota (Finnemore & Sikkink, 1998). Menurut teori *norm life-cycle* Finnemore dan Sikkink, norma perlindungan pengungsi melewati tahap munculnya (*norm emergence*), penyebaran (*norm cascade*), hingga institusionalisasi (*norm internalization*) di tatanan internasional. Organisasi seperti UNHCR dan LSM kemanusiaan berperan sebagai agen pemrakarsa norma, membangun kesadaran global tentang kewajiban menerima dan melindungi pengungsi. Selain itu, konstruktivis menekankan bahwa negara membentuk kebijakan bukan hanya karena logika keuntungan (*cost-benefit*), tetapi karena logika kecocokan dengan identitas sosial mereka. Misalnya, pemerintah yang mengidentifikasi dirinya sebagai berkomitmen pada solidaritas kemanusiaan akan mengadopsi kebijakan penerimaan pengungsi sesuai norma tersebut, meskipun mungkin ada biaya ekonomi, karena bertindak demikian “sesuai dengan siapa mereka”. Dengan demikian, negara-negara kadang bertindak menurut norma yang telah diinternalisasi jika merasa hal itu sesuai dengan citra dan nilai yang mereka anut.

Secara sistematis, konstruktivisme menawarkan kerangka untuk memahami dinamika politik pengungsi: bukan hanya melihat pengungsi sebagai “masalah” material, tetapi memperhatikan bagaimana *cara pandang* sosial dan budaya tentang pengungsi ikut membentuk kebijakan. Contoh konkret dari krisis Ukraina telah menegaskan hal ini. Respons

cepat dan terbukanya banyak negara Eropa terhadap pengungsi Ukraina mencerminkan kesamaan identitas Eropa dan narasi solidaritas, sehingga kebijakan yang diterbitkan sangat berbeda dengan respons terhadap krisis sebelumnya (Nathoo, 2023). Di sisi lain, konsistensi norma hak pengungsi tetap ditegakkan oleh negara-negara yang menganggapnya bagian dari identitas internasional mereka. Sebaliknya, negara lain yang melihat pengungsi sebagai “ancaman” (dari sudut identitas atau keamanan) berupaya membangun norma yang ketat atau menolak komitmen solidaritas.

Adapun dampak-dampak terkait pengungsi dalam hubungan internasional, yaitu

a) Dampak Sosial

Dampak sosial merujuk pada pengaruh atau konsekuensi dari suatu peristiwa, kondisi, atau kebijakan yang menyebabkan perubahan, baik positif maupun negatif, dalam lingkungan dan keadaan sosial. Perubahan ini dapat meliputi aspek pendidikan, dinamika sosial, serta gaya hidup. Selain itu, dampak sosial juga dapat dipahami sebagai kajian terhadap kondisi masyarakat yang dipengaruhi oleh pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan di suatu wilayah atau area (Wati et al., 2020).

Isu pengungsi merupakan fenomena global dengan jumlah puluhan juta jiwa. Menurut laporan Bank Dunia, sekitar 2,3% populasi dunia ( $\pm 184$  juta orang) hidup di luar negara asalnya, termasuk 37 juta pengungsi (World Bank, 2023). Kondisi ini menimbulkan potensi persaingan sumber daya dan ketegangan sosial antara penduduk lokal dan pengungsi. Persaingan dalam lapangan kerja, kebutuhan publik (sekolah, layanan kesehatan), dan penurunan upah akibat kelebihan tenaga kerja rentan memicu resistensi sosial (Fajth et al., 2019). Namun literatur juga memperlihatkan bahwa dampak sosial tersebut sangat bergantung konteks lokal, termasuk faktor kesamaan budaya, kebijakan pemerintah, dan sikap masyarakat setempat.

Dampak sosial pada pengungsi sendiri bersifat kompleks dan seringkali berkaitan dengan kondisi psikososial. Perjalanan migrasi paksa umumnya dipenuhi dengan trauma (meninggalkan kampung, kekerasan yang dialami) dan ketidakpastian (status hukum, ketidakpastian masa depan). Pengungsi lebih rentan mengalami kondisi kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan PTSD ketimbang penduduk local (WHO, 2025). Banyak pengungsi melaporkan gejala stres (gelisah, insomnia, rasa putus asa) sebagai dampak beragam peristiwa berat yang mereka alami sebelum maupun selama pengungsian (WHO, 2025). aktor-faktor sosial turut memperburuk atau melindungi kondisi ini. Misalnya, adanya komunitas pengungsi yang berjejaring (dengan latar budaya yang sama) dapat membantu menjaga stabilitas psikologis; sekolah bagi anak dan dukungan sosial menunjukkan korelasi positif terhadap kesehatan mental pengungsi. Sebaliknya, ketidakamanan ekonomi (penghasilan tidak pasti, perumahan sempit), serta stigma dan diskriminasi dari penduduk lokal cenderung memperburuk kesehatan jiwa pengungsi (WHO, 2025).

Konstruktivisme menekankan bahwa pengalaman ini bukan hanya akibat kondisi material, tetapi juga konstruksi sosial dan simbolik terhadap siapa pengungsi itu. negara sering memperlakukan pengungsi berdasarkan identitas yang dikonstruksikan melalui wacana publik, bukan hanya berdasarkan status hukum (Gurowitz, 1999). Pengungsi yang dianggap “serupa” dengan masyarakat penerima (dari segi agama, bahasa, atau budaya) cenderung lebih mudah diterima, sementara mereka yang dipandang “berbeda” kerap distereotipkan dan dikucilkan.

#### b) Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi merupakan efek atau konsekuensi dari suatu peristiwa, kondisi, atau kebijakan yang menyebabkan perubahan dalam aspek ekonomi, baik yang menguntungkan maupun merugikan. Dampak positifnya dapat berupa terciptanya

lapangan pekerjaan serta meningkatnya pendapatan masyarakat. Sementara itu, dampak negatifnya dapat terlihat dari perubahan perilaku ekonomi masyarakat yang cenderung menjadi konsumtif, di mana mereka lebih banyak menggunakan produk tanpa memproduksinya sendiri (Wati et al., 2020).

Kehidupan ekonomi pengungsi beragam, dengan variasi signifikan dalam pendapatan, aset, dan ketahanan pangan tergantung konteks, kebangsaan, dan rumah tangga (Betts et al., 2024). Sebagian besar pengungsi hidup dalam kemiskinan ekstrim dan kerentanan tinggi, sehingga sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan (UNHCR, 2023).

Pendekatan konstruktivis menyoroti bahwa pemaknaan sosial atas pengungsi dibentuk lewat wacana, narasi, dan norma bersama. Pengungsi sering “dipentaskan” dalam narasi tertentu misalnya sebagai korban malahan atau sebagai komoditas yang dieksploitasi sehingga mereka terperangkap dalam ketimpangan kekuasaan (Morris, 2023). Narasi kesengsaraan pengungsi yang populer justru dapat mengaburkan isu struktural, bahkan ‘memfetisiskan’ penderitaan mereka demi mendukung agenda lembaga dan pelaku ekonomi tertentu. (Morris, 2023). Konsep-konsep ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial pengungsi (apakah dipersepsi sebagai korban murni atau beban) mempengaruhi kebijakan dan relasi kekuatan dalam sistem internasional. Negara-negara tidak dapat dilepaskan dari konteks makna historis dan sosial yang membentuk identitas dan kepentingan mereka (Kappenberg, 2019).

Berdasarkan perspektif konstruktivis, tiga elemen utama yang mempengaruhi pengalaman ekonomi pengungsi adalah:

- **Norma Internasional:** Kesepakatan dan hukum global (seperti Konvensi 1951) menetapkan kerangka hak ekonomi. Negara yang mematuhi norma-

norma ini cenderung memberi akses kerja dan layanan ekonomi bagi pengungsi (Betts & Sterck, 2022).

- Identitas Sosial: Posisi sosial dan stereotip yang melekat pada identitas pengungsi (ras, etnis, agama, dsb.) mempengaruhi sikap tuan rumah. Diskriminasi berbasis identitas dapat menghambat integrasi ekonomi, sehingga pengungsi yang terstigmatisasi cenderung memiliki peluang kerja yang lebih rendah.
- Konstruksi Makna: Narasi kolektif tentang pengungsi – misalnya narasi kemanusiaan atau keamanan – membentuk kebijakan dan praktik. Narasi tersebut dapat menguntungkan atau merugikan pengungsi secara ekonomi, tergantung bagaimana mereka ‘dikategorikan’ dalam wacana public (Morris, 2023).

Konstruktivisme menekankan bahwa norma dan makna ini bersifat dinamis. Jika kerangka pandang sosial terhadap pengungsi bergeser, misalnya karena perubahan politik atau advokasi maka kebijakan ekonomi mereka juga dapat berubah. Norma dan identitas internasional dibentuk dalam interaksi sosial dan dapat direvitalisasi (Kappenberg, 2019). Dengan demikian, menguatnya norma global tentang inklusi ekonomi dan perubahan persepsi sosial bisa membuka akses ekonomi yang lebih besar bagi pengungsi. Ringkasnya, pengalaman ekonomi pengungsi merupakan hasil dari interaksi norma internasional, identitas sosial, dan konstruksi makna kolektif. Pendekatan konstruktivis menggarisbawahi bahwa untuk memperbaiki kondisi ekonomi pengungsi diperlukan perubahan bukan hanya pada kebijakan material, melainkan juga pada norma dan wacana sosial yang mendasarinya (Betts & Sterck, 2022).

c) Dampak Politik

Dampak politik adalah pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa, kebijakan, atau keputusan dalam ranah politik yang menyebabkan perubahan dalam sistem pemerintahan, kebijakan publik, stabilitas politik, hingga partisipasi masyarakat dalam proses politik. Dampak ini dapat bersifat positif, seperti meningkatnya kesadaran politik dan demokratisasi, maupun negatif, seperti ketidakstabilan pemerintahan dan konflik politik (Heywood, 2013).

Isu pengungsi kini menjadi instrumen penting dalam diplomasi antarnegara. Banyak negara memanfaatkan negosiasi migrasi untuk menegosiasikan isu yang lebih luas dalam hubungan bilateral atau blok regional. Dalam praktiknya, negara tujuan sering melakukan migrasi diplomasi dengan menawarkan bantuan ekonomi, akses perdagangan, atau dukungan politik kepada negara asal atau transit agar membantu mengendalikan arus migran dan pengungsi (Friedrich-Ebert-Stiftung, 2024). Model ini bisa dianalogikan dengan permainan catur di arena politik internasional, di mana hak pengungsi menjadi pion penting. Contoh konkretnya adalah kesepakatan bilateral di mana negara-negara maju memberikan insentif agar negara transit menampung atau menghalau pergerakan pengungsi.

Kebijakan demikian sering kali berpangkal pada kepentingan nasional; misalnya, sebuah negara mungkin secara sengaja mengizinkan atau memicu migrasi keluar wilayahnya untuk memojokkan negara tetangga dalam negosiasi politik atau ekonomi (Tsourapas, 2022). Tsourapas menegaskan bahwa “pengungsi dan migran kian dipakai sebagai instrumen dalam diplomasi global” dan terkadang ‘diangkat menjadi senjata’ dalam konflik geopolitik. Situasi ini memicu kecemasan internasional sekaligus tekanan politik: negara-negara penerima pengungsi menuntut negara-negara pengirim atau transit untuk menahan arus migran demi menjaga stabilitas mereka sendiri. Debat tentang *externalization* kebijakan migrasi (menyerahkan tanggung jawab penanganan

pengungsi ke negara ketiga) menunjukkan betapa kuatnya pengaruh isu pengungsi terhadap hubungan diplomatik. Kebijakan seperti ini sering berakhir pada negosiasi yang kompleks antara negara, dan kerap menghasilkan tekanan lembaga internasional untuk pembentukan kesepakatan multilateral di bidang migrasi.

## **B. Human Security terkait Pengungsi**

*Human security* terkait pengungsi mencakup perlindungan dari kekerasan langsung (fisik) dan struktural. Mereka menyoroti pentingnya keamanan perempuan dan anak-anak dalam situasi pengungsian, mengingat kelompok ini sering menjadi korban utama eksploitasi (Karim, & Beardsley, 2017). Menurut Edward Newman, pengungsi adalah masalah global yang memerlukan kolaborasi internasional, bukan hanya pendekatan berbasis negara. Dia juga menyoroti bahwa kegagalan dalam memenuhi kebutuhan pengungsi dapat memperburuk ketegangan regional (Newman, 2001).

Adapun dampak-dampak terkait *Human security* terkait pengungsi, yaitu

### a) Dampak pada Keamanan Pribadi (*Personal Security*)

Keamanan pribadi meliputi upaya melindungi individu dari berbagai ancaman kekerasan fisik, termasuk konflik bersenjata, tindak kejahatan, serta penindasan yang dilakukan oleh negara atau kelompok tertentu (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007).

### b) Dampak pada Keamanan Ekonomi (*Economic Security*)

Keamanan ekonomi merujuk pada kondisi di mana individu terbebas dari ketidakstabilan keuangan serta risiko kehilangan sumber penghasilan, baik yang disebabkan oleh faktor ekonomi di tingkat lokal maupun global (King & Murray, 2001). Berdasarkan laporan *Human Development Report 1994*, keamanan ekonomi mengacu pada ketersediaan akses terhadap sumber daya yang memadai untuk mencukupi kebutuhan dasar, termasuk kesempatan kerja yang stabil serta perlindungan dari ketidakpastian ekonomi, seperti pengangguran dan inflasi (UNDP, 1994).

c) Dampak pada Keamanan Politik (*Political Security*)

Keamanan politik mencakup kestabilan suatu negara, keabsahan pemerintahan, serta perlindungan terhadap ancaman seperti kudeta, pemberontakan, dan sistem pemerintahan yang bersifat otoriter (Buzan et al., 1998). Keamanan politik memiliki hubungan yang erat dengan kestabilan lembaga politik, kelangsungan sistem demokrasi, serta terjaminnya hak-hak politik individu dan kelompok masyarakat tanpa adanya ancaman (Paris, 2001).

### C. Pengungsi Ukraina di Polandia

Pasca invasi Rusia ke Ukraina 24 Februari 2022, sekitar 874.000 warga Ukraina mengungsi ke negara tetangga dalam seminggu. Estimasi jumlah pengungsi bervariasi UNHCR memproyeksikan 4 juta jiwa, sedangkan Uni Eropa memperkirakan hingga 7 juta. Polandia menjadi tujuan utama para pengungsi tersebut (Ociepa-Kicińska & Gorzałczyńska-Koczkodaj, 2022).

Serangan tiba-tiba yang dilancarkan oleh Rusia menyebabkan kepanikan dan ketidakstabilan di kalangan warga Ukraina. Serangan ini menyasar sejumlah kota dan infrastruktur vital, sehingga mendorong banyak penduduk untuk mengungsi demi menjaga keselamatan diri. Beberapa daerah yang terkena dampak konflik mulai menghadapi krisis pasokan makanan, air minum, obat-obatan, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya. Ancaman kekerasan, termasuk serangan militer, pengeboman, dan berbagai tindakan brutal lainnya, mendorong banyak orang, terutama wanita dan anak-anak, untuk mencari perlindungan di tempat yang lebih aman. Selain itu, laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia, seperti penangkapan tanpa prosedur yang jelas, penyiksaan, dan eksekusi, semakin memperburuk ketakutan serta mendorong gelombang migrasi besar-besaran (Klaus et al., 2018).

Arus besar pengungsi Ukraina yang memasuki wilayah Polandia dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama, seperti kedekatan wilayah geografis, keterkaitan historis dan

budaya, pertimbangan politik, serta pendekatan kemanusiaan yang diimplementasikan melalui kebijakan perbatasan terbuka oleh pemerintah Polandia. Posisi geografis Polandia yang berbatasan langsung dengan Ukraina di sisi barat menjadikannya tujuan yang wajar dan strategis bagi warga yang melarikan diri dari konflik. Selain itu, akses transportasi yang memadai—melalui jaringan jalan, rel kereta, dan pos perbatasan resmi—mempermudah proses evakuasi menuju tempat yang lebih aman (EUAA, 2022).

Pemerintah Polandia menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menerima dan mendukung pengungsi asal Ukraina melalui penerapan kebijakan perbatasan terbuka serta berbagai program bantuan kemanusiaan, termasuk pengesahan Undang-Undang Bantuan (AoAUC). Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi para pengungsi untuk memperoleh nomor identitas PESEL, yang memungkinkan mereka mengakses layanan publik dengan hak yang setara dengan warga Polandia. Selain itu, pemerintah juga menyediakan bantuan kemanusiaan seperti tempat tinggal sementara, distribusi makanan, dan layanan medis bagi para pengungsi yang terdampak perang (Pędziwiatr, & Magdziarz, 2022).

Selain dukungan dari pemerintah, masyarakat sipil Polandia secara umum juga menunjukkan solidaritas yang luar biasa terhadap para pengungsi Ukraina. Dukungan ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti menyediakan tempat tinggal, bantuan pangan, dan kebutuhan pokok lainnya. Sebagai bagian dari Uni Eropa, Polandia juga menerima dukungan finansial dan logistik dari lembaga-lembaga Uni Eropa guna menghadapi krisis pengungsi ini. Kombinasi dari berbagai faktor tersebut menjadikan Polandia sebagai tujuan utama bagi warga Ukraina yang mencari perlindungan, baik untuk jangka pendek maupun panjang. Faktor lain yang menarik bagi pengungsi adalah stabilitas politik serta tingkat keamanan yang relatif tinggi di Polandia, yang menciptakan rasa aman. Selain itu, sistem sosial yang cukup mapan dan tersedianya layanan publik yang memadai turut menunjang pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Polandia juga menawarkan prospek ekonomi yang

lebih baik dibandingkan beberapa negara tetangganya, menjadikannya pilihan yang menjanjikan bagi mereka yang ingin membangun kehidupan baru dan memperoleh penghasilan yang stabil. Di sektor pendidikan, banyak sekolah di Polandia telah menerima siswa dari Ukraina dan menyelenggarakan program integrasi untuk mendukung adaptasi mereka di lingkungan pendidikan baru. Fasilitas ini dirancang untuk mempermudah transisi akademik dan sosial anak-anak pengungsi, termasuk melalui pembelajaran bahasa lokal, aktivitas kultural, serta dukungan psikologis (European Commission, 2022).

a) Dampak Sosial Polandia Terhadap Pengungsi Ukraina di Polandia

Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, Polandia menghadapi perubahan sosial signifikan akibat arus masuk jutaan pengungsi Ukraina. Lonjakan populasi yang cepat, terutama di kota-kota besar seperti Warsawa, Kraków, dan Gdańsk, menciptakan tantangan berat untuk infrastruktur sosial negara. Bidang pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan mengalami tekanan sangat tinggi untuk memenuhi permintaan yang meningkat secara eksponensial. Lembaga pendidikan terpaksa menampung lebih banyak murid, banyak di antaranya membutuhkan dukungan khusus untuk menguasai bahasa Polandia dan beradaptasi dengan sistem pembelajaran setempat. Di sektor kesehatan, peningkatan jumlah pasien menyebabkan risiko keterlambatan layanan serta keterbatasan fasilitas dan tenaga medis. Situasi ini menunjukkan beban besar yang harus ditanggung sektor publik Polandia akibat perubahan demografis mendadak tersebut (Sheptycki, 2024).

Dari perspektif sosial dan budaya, masuknya pengungsi Ukraina memberikan kontribusi terhadap peningkatan keragaman di Polandia. Banyak masyarakat Polandia yang menunjukkan rasa solidaritas dan memberikan bantuan agar para pengungsi dapat beradaptasi serta menjadi bagian dari komunitas lokal. Meski begitu, proses integrasi tidak selalu mulus, karena perbedaan budaya dan hambatan bahasa sering kali menjadi

kendala utama. Walau demikian, sejumlah besar pengungsi berhasil menyesuaikan diri dengan cepat dan turut berperan aktif dalam kehidupan masyarakat setempat. Secara keseluruhan, kondisi sosial Polandia saat ini menggambarkan perpaduan antara tantangan dalam penyesuaian sistem pelayanan publik dan potensi yang dimiliki untuk memperkaya aspek sosial dan ekonomi melalui kehadiran para pengungsi dari Ukraina (Toth, 2024).

Pada awal kedatangan pengungsi Ukraina, sekitar 50% warga Polandia menyatakan dukungan terhadap pemberian bantuan sosial, sementara hanya 20% yang menolaknya. Namun, seiring perpanjangan konflik, tingkat dukungan mengalami penurunan drastis, dengan hanya 21% yang tetap setuju, sementara 47% menunjukkan penolakan. Kekhawatiran utama yang muncul di kalangan masyarakat Polandia adalah potensi pengurangan pendanaan untuk sektor krusial domestik seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur akibat alokasi anggaran bagi pengungsi. Selain itu, muncul pula kecemasan bahwa peningkatan bantuan sosial bagi pengungsi bisa memicu kenaikan pajak atau pengurangan layanan publik untuk warga lokal. Banyak warga menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat Polandia harus tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan kebijakan sosial pemerintah (Alamsyah, & Emerald, 2024).

#### b) Dampak Politik Polandia Terhadap Pengungsi Ukraina di Polandia

Kondisi politik dalam negeri Polandia mengalami dinamika yang cukup besar setelah masuknya pengungsi Ukraina pada tahun 2022. Pemerintah dihadapkan pada tantangan berat dalam memenuhi kebutuhan mendesak para pengungsi, termasuk penyediaan akomodasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya. Meskipun upaya penanganan dilakukan, pelaksanaannya mengalami hambatan akibat belum adanya kerangka hukum yang memadai untuk proses evakuasi, serta

kurangnya sistem penanganan pengungsi yang menyeluruh dan terkoordinasi secara efektif (Reidy, 2022).

Setahun pasca-invasi Rusia ke Ukraina, situasi politik dalam negeri Polandia mulai dipengaruhi oleh langkah strategis Partai Hukum dan Keadilan (PiS) serta kelompok konservatif sayap kanan yang memanfaatkan kekhawatiran masyarakat akan dampak sosial, ekonomi dari kehadiran pengungsi. Di sisi lain, partai oposisi seperti Koalisi Sipil berusaha memperkuat basis dukungan melalui serangkaian demonstrasi besar-besaran di tingkat nasional. Ketegangan politik semakin memanas akibat sengketa antara Polandia dan Ukraina terkait impor gandum, yang dianggap menekan harga pasar domestik dan merugikan sektor pertanian Polandia (Buitrago, 2023).

Pada masa awal invasi, Partai Hukum dan Keadilan (PiS) menyatakan dukungan penuh kepada Ukraina, didorong oleh rasa solidaritas masyarakat Polandia terhadap para pengungsi. Namun, seiring menurunnya antusiasme publik, PiS mulai beralih fokus ke isu-isu domestik, seperti protes petani terkait dampak negatif impor gandum Ukraina yang merugikan sektor pertanian lokal. Di lain sisi, Koalisi Sipil, sebagai oposisi utama PiS, mengambil pendekatan lebih moderat dalam menangani hubungan dengan Ukraina. Meski menjaga sikap netral dalam beberapa aspek, mereka tetap mendorong peningkatan bantuan militer bagi Kyiv (*Visit Ukraine*, 2023).

Mereka mengira bahwa dukungan militer kepada Ukraina selaras dengan kepentingan negara, karena stabilitas di Ukraina diyakini akan berdampak positif pada keamanan nasional Polandia. Di sisi lain, Konfederasi, partai berhaluan sayap kanan, secara tegas menolak segala bentuk bantuan kepada Ukraina. Partai ini gencar menyebarkan narasi anti-Ukraina dan kampanye anti-imigrasi untuk mendulang dukungan dari kelompok masyarakat yang skeptis atau menentang kehadiran pengungsi. Konfederasi memanfaatkan ketidakpuasan sebagian warga terhadap isu

migrasi sebagai alat politik untuk memperkuat basis pendukungnya (Wigura & Kuisz, 2023).

Uni Eropa memberlakukan kebijakan darurat yang memungkinkan masuknya produk pangan dari Ukraina tanpa dikenakan tarif, sebagai upaya untuk menciptakan jalur darat yang aman dan efektif dalam mendistribusikan biji-bijian penting serta mengurangi potensi krisis pangan global. Akan tetapi, kebijakan ini menyebabkan harga biji-bijian menurun, sehingga memicu kekhawatiran di kalangan petani di sejumlah negara Eropa Timur, seperti Polandia, Hungaria, Slovakia, Rumania, dan Bulgaria. Menanggapi hal tersebut, kelima negara tersebut mengambil langkah membatasi impor gandum dari Ukraina sebelum Uni Eropa merumuskan pendekatan yang lebih menyeluruh, yang pada gilirannya menimbulkan ketegangan antara Brussel dan Kyiv (The Associated Press, 2023).

Dalam rangka melindungi kepentingan petani dalam negeri, Uni Eropa memberlakukan pembatasan sementara atas impor produk pertanian seperti gandum, jagung, lobak, dan biji bunga matahari dari Ukraina ke lima negara anggota. Kebijakan tersebut tetap memperbolehkan pengangkutan komoditas melalui wilayah tersebut, namun melarang penjualannya di pasar lokal. Meski sempat mendapat penolakan dari kelompok petani, Bulgaria dan Rumania akhirnya memutuskan untuk mencabut larangan tersebut. Sebaliknya, Polandia, Hungaria, dan Slovakia tetap melanjutkan kebijakan pembatasan terhadap penjualan biji-bijian Ukraina di pasar domestik mereka. Menteri Pertanian Hungaria bahkan mengumumkan perluasan larangan terhadap lebih banyak jenis barang ekspor asal Ukraina. Di sisi lain, Presiden Polandia menyatakan bahwa langkah ini diperlukan untuk melindungi petani lokal dari persaingan harga yang tidak seimbang akibat rendahnya harga biji-bijian Ukraina. Sementara itu, meskipun

Slovakia tetap melarang penjualan, negara tersebut masih mengizinkan biji-bijian Ukraina untuk transit melalui wilayahnya (Wiseman & Musambi, 2023).

Hubungan antara Polandia dan Ukraina semakin memanas setelah Presiden Polandia, Andrzej Duda, membuat pernyataan yang menggambarkan Ukraina sebagai seseorang yang tengah tenggelam dan berusaha menyelamatkan diri dengan berpegangan pada Polandia. Ketegangan tersebut diperparah oleh kritik dari pihak Polandia terhadap pidato Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, yang dianggap tidak mencerminkan rasa terima kasih atas dukungan yang telah diberikan sejak awal konflik. Menanggapi situasi tersebut, Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki, mengumumkan bahwa negaranya tidak lagi akan mengirimkan bantuan senjata ke Ukraina, dengan alasan bahwa pemerintah kini memprioritaskan peningkatan kapasitas militer nasional. Sebelumnya, sekitar sepertiga peralatan militer Polandia telah dialihkan untuk mendukung Ukraina, yang berdampak pada penurunan kemampuan pertahanan nasional yang cukup besar. (Fortinsky, & Sarah. 2023).

Meskipun telah menghentikan aliran bantuan militer, Polandia tetap memberikan dukungan kepada Ukraina dalam menghadapi agresi Rusia yang terus berlanjut. Namun, apabila ketegangan terkait impor biji-bijian terus meningkat, pemerintah Polandia mempertimbangkan untuk memperluas pembatasan terhadap sejumlah produk Ukraina lainnya. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga kestabilan pasar dalam negeri, menghindari gangguan pada sektor ekonomi nasional, serta mencegah jatuhnya harga komoditas akibat masuknya biji-bijian dari Ukraina yang dapat merugikan petani lokal (Gera, & Scisłowska. 2023).

Polandia diperkirakan akan mempertahankan posisi konsistennya sebagai pendukung perjuangan Ukraina melawan invasi Rusia, sekaligus mendorong penguatan hubungan bilateral Ukraina dengan Uni Eropa. Komitmen ini diyakini tetap kokoh

meskipun ada potensi perubahan dalam dinamika politik domestik, mencerminkan kepentingan strategis yang saling menguntungkan antara kedua negara dalam menghadapi ancaman regional. Negeri ini juga diprediksi akan terus berperan aktif dalam pemberian bantuan kemanusiaan, mendukung pelaksanaan sanksi global terhadap Rusia, serta membuka akses bagi peningkatan jumlah pengungsi Ukraina. Namun, arah kebijakan tersebut tetap bergantung pada hasil pemilihan umum dan kemungkinan resistensi dari partai koalisi yang mungkin mengusung kebijakan proteksionis terhadap impor produk pertanian Ukraina.

#### c) Dampak Perekonomian Polandia Terhadap Pengungsi Ukraina di Polandia

Dampak ekonomi kehadiran pengungsi sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dan tingkat dukungan masyarakat. Jika dikelola dengan strategi yang tepat, para pengungsi berpotensi menjadi aset strategis bagi negara penerima, baik dalam skala jangka pendek maupun jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi biasanya didorong dua faktor utama: peningkatan jumlah tenaga kerja dan peningkatan produktivitas. Sebagai anggota Uni Eropa, Polandia menempati posisi kelima dalam kategori penurunan populasi tercepat beberapa tahun terakhir. Untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia di sektor-sektor kritis, pemerintah memanfaatkan kehadiran pengungsi sebagai upaya untuk menguatkan ekonomi. Melalui partisipasi di dunia kerja dan pembayaran pajak, pengungsi memberikan kontribusi konkret bagi perekonomian nasional. Selain itu, peningkatan permintaan barang dan jasa akibat kebutuhan pengungsi turut mendorong dinamisasi ekonomi lokal, memperluas peluang bisnis, serta meningkatkan pendapatan komunitas setempat. (Al Jazeera, 2022).

Penggunaan kartu kredit oleh pengungsi Ukraina di Polandia, yang diterbitkan oleh institusi keuangan Ukraina, telah menjadi sumber kontribusi ekonomi signifikan bagi negara tersebut. Salah satu parameter utama dampak ini adalah kenaikan penerimaan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mencapai sekitar 760 juta dolar Amerika Serikat. Pada fase awal krisis, sebagian besar aktivitas transaksi tersebut terpusat di kawasan perbatasan Polandia. Namun, seiring berkepanjangan konflik dan perpindahan pengungsi ke kota-kota besar seperti Warsawa, pola konsumsi mulai berubah. Perubahan ini memicu perpindahan fokus pengeluaran dan arus pendapatan ke pusat-pusat perkotaan utama, sehingga mengubah pola distribusi ekonomi di tingkat regional dalam negeri. (HIAS. 2024).

Perekonomian Polandia mendapat suntikan kontribusi ekonomi sebesar 670 miliar dolar berkat aliran tenaga kerja dari warga Ukraina, menempatkannya di posisi lebih tinggi dibandingkan negara penerima pengungsi lainnya. Dalam tiga bulan pertama pasca-invasi Rusia ke Ukraina, Institut Ekonomi Polandia menyebutkan bahwa masyarakat menyalurkan bantuan mencapai 2,1 miliar dolar kepada para pengungsi. Pemerintah Polandia juga berkomitmen menambah alokasi dana sebesar 3,4 miliar dolar sepanjang 2022. Selain itu, pengungsi Ukraina di Polandia memiliki akses sepadan dengan penduduk lokal, terkhusus dalam memperoleh peluang kerja. Menurut data dari Kementerian Tenaga Kerja Polandia, hingga akhir Juli 2022, sekitar 385.000 pengungsi Ukraina telah mendapatkan pekerjaan. Kontribusi mereka di sektor ketenagakerjaan ikut mendukung pertumbuhan ekonomi Polandia, menjadikannya salah satu yang tercepat di Eropa dalam beberapa tahun terakhir. (Anstey, & Chris, 2022).

Mayoritas pengungsi Ukraina di Polandia berhasil mendapatkan pendapatan yang memadai melalui aktivitas pekerjaan mereka. Proses integrasi mereka ke dalam pasar tenaga kerja Polandia berlangsung cepat dan efektif, memungkinkan mereka memperoleh mata pencaharian dan memenuhi kebutuhan pokok. Selain menekuni berbagai bidang kerja, termasuk dalam skema penuh waktu, paruh waktu, atau sebagai

pekerja lepas, sebagian tetap menjalankan pekerjaan dari jarak jauh untuk perusahaan di Ukraina. Bentuk pekerjaan ini meliputi tugas berbasis digital, kontrak proyek, atau model kerja fleksibel lainnya yang memungkinkan mereka tetap berkontribusi pada perusahaan asal meski menetap di Polandia. Dalam upaya mengurangi beban anggaran negara, Pemerintah Polandia memilih tidak memberikan bantuan keuangan besar-besaran kepada para pengungsi, melainkan mengutamakan dukungan sukarela dari masyarakat lokal dan subsidi yang bersifat selektif (Ciobanu, & Claudia, 2023).

#### D. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

<b>Judul Penelitian</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Tahun</b>	<b>Fokus Penelitian</b>
Peran UNICEF Dalam Menangani Pengungsi Anak Ukraina di Polandia Tahun 2022-2023	Aprilia Fadya Anisa	2024	Dampak Peran UNICEF Dalam Penanganan Pengungsi Anak Ukraina di Polandia Pada Tahun 2022-2023
Malam dan Siang: sebuah penyelidikan tentang perbedaan respons internasional terhadap krisis pengungsi Suriah vs. krisis pengungsi Ukraina melalui sudut pandang teoritis konstruktivisme	Asha Nenshi Nathoo	2023	Menganalisis perbedaan respons global terhadap krisis pengungsi Suriah (2011–sekarang) dan Ukraina (2022–sekarang) melalui lensa konstruktivisme dalam hubungan internasional
Analisis Ketidapatuhan Polandia Terhadap <i>EU Relocation Scheme</i> Oleh Uni Eropa Dalam Krisis Pengungsi di Eropa Tahun 2015-2017	Athira Nistrina Nurwansyah	2022	Dampak Akibat Ketidapatuhan Polandia Terhadap <i>EU Relocation Scheme</i> Oleh Uni Eropa Dalam Krisis Pengungsi di Eropa Tahun 2015-2017
Pergeseran Kebijakan Integrasi Imigran Uni Eropa terhadap Imigran Timur Tengah-Afrika dan Ukraina	Rizal Al Hamid	2022	Dampak Pergeseran Kebijakan Integrasi Imigran Uni Eropa Terhadap Imigran Timur Tengah-Afrika dan Ukraina
Sekuritisasi Isu Migrasi di Polandia	Mega Nisfa Makhroja	2020	Dampak Sekuritisasi Isu Migrasi di Polandia Pasca krisis Pengungsi di Uni Eropa

Pasca Krisis Pengungsi di Uni Eropa			
Diferensiasi Kebijakan Polandia dalam Menghadapi Migran Ekonomi dan Pengungsi	Rizky Anandita, Fadia Ayunabila Safitri, Dasa Safitri & Rahmatul Amalia N. A.	2018	Dampak Diferensiasi Kebijakan Polandia dalam Menghadapi Migran Ekonomi dan Pengungsi
Implikasi Kebijakan Penerimaan Pengungsi terhadap Pembentukan Pandangan Baik bagi Jerman dan Eropa	Fauzi Firmansyah	2013	Kebijakan Penerimaan Pengungsi terhadap Pembentukan Pandangan Baik bagi Jerman dan Eropa

Penelitian pertama berjudul “Peran UNICEF Dalam Menangani Pengungsi Anak Ukraina di Polandia Tahun 2022-2023” yang ditulis oleh Aprilia Fadya Anisa yang diterbitkan pada 31 Mei 2024. Penelitian ini membahas tentang Peran UNICEF Dalam Menangani Pengungsi Anak Ukraina di Polandia.

Invasi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan krisis kemanusiaan terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II. Berdasarkan data UNHCR, lebih dari 8 juta warga Ukraina terpaksa mengungsi ke luar negeri, dengan Polandia menjadi salah satu negara tujuan utama. Sekitar 90% dari mereka adalah perempuan dan anak-anak, karena laki-laki berusia 18-60 tahun diwajibkan tetap di Ukraina. Hingga akhir 2023, Polandia telah menampung sekitar 1,5 juta pengungsi Ukraina, termasuk lebih dari 500.000 anak. Kondisi ini menghadirkan tantangan kompleks, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, akses pendidikan, hingga kesehatan mental. Sebagai lembaga PBB yang berfokus pada hak-hak anak, UNICEF memainkan peran kunci dalam menangani krisis ini. Dengan bekerja sama dengan pemerintah Polandia, organisasi non-pemerintah lokal, serta mitra internasional, UNICEF menjalankan berbagai program terpadu guna memastikan anak-anak pengungsi mendapatkan perlindungan, akses pendidikan, dan dukungan psikososial.

Pada periode 2022-2023, UNICEF membuktikan perannya sebagai pemimpin global dalam perlindungan anak di tengah krisis. Dengan respons yang terkoordinasi, inovasi dalam pendidikan, dan pendekatan menyeluruh, organisasi ini berhasil membantu puluhan ribu anak Ukraina menghadapi situasi sulit. Namun, keberlanjutan program ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah Polandia, dukungan finansial dari komunitas internasional, serta kesiapan masyarakat dalam mengintegrasikan pengungsi ke dalam kehidupan sosial mereka.

Penelitian kedua berjudul “Malam dan Siang: sebuah penyelidikan tentang perbedaan respons internasional terhadap krisis pengungsi Suriah vs. krisis pengungsi Ukraina melalui sudut pandang teoritis konstruktivisme” yang ditulis Asha Nenshi Nathoo yang diterbitkan pada tahun 2023. Penelitian membahas tentang Menganalisis perbedaan respons global terhadap krisis pengungsi Suriah (2011–sekarang) dan Ukraina (2022–sekarang) melalui lensa konstruktivisme dalam hubungan internasional

Perbedaan mencolok dalam respons global terhadap dua krisis pengungsi besar di era modern: pengungsi Suriah dan pengungsi Ukraina. Meskipun kedua kelompok melarikan diri dari kekerasan bersenjata dan membutuhkan perlindungan, mereka diperlakukan sangat berbeda oleh negara-negara penerima di Eropa dan Amerika Utara. Penulis menggunakan lensa teori konstruktivisme untuk menjelaskan bagaimana konstruksi sosial terhadap identitas, ras, agama, dan persepsi media membentuk kebijakan serta opini publik secara signifikan.

Menurut data UNHCR (2023), lebih dari 8 juta warga Ukraina telah melarikan diri ke Eropa sejak invasi Rusia, dan krisis ini disebut-sebut sebagai salah satu krisis kemanusiaan terbesar di benua tersebut. Namun, hanya beberapa tahun sebelumnya, lebih dari 6,7 juta warga Suriah telah menjadi pengungsi akibat perang saudara yang berkepanjangan. Perbandingan data ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif, kedua

krisis ini sangat signifikan. Namun secara kualitatif, tanggapan internasional sangat berbeda.

Peneliti menekankan bahwa salah satu alasan utama perbedaan ini adalah identitas sosial yang dikonstruksi terhadap kedua kelompok pengungsi. Identitas orang Ukraina yang mayoritas berkulit putih, beragama Kristen, dan berasal dari Eropa menyebabkan mereka dipersepsikan sebagai “lebih dekat” dengan masyarakat Barat. Ini sesuai dengan gagasan Benedict Anderson (2006) tentang “komunitas imajiner,” di mana kedekatan etnis, bahasa, dan budaya menciptakan rasa keterikatan di antara anggota komunitas yang sebenarnya tidak saling mengenal secara langsung.

Sementara itu, pengungsi Suriah yang mayoritas Muslim dan berkulit gelap dipersepsikan secara stereotipikal sebagai “asing,” “berbahaya,” atau “berpotensi radikal.” Hal ini diperkuat oleh narasi pasca-9/11 di mana Muslim secara tidak adil diasosiasikan dengan terorisme. Mayoritas responden di Eropa menganggap pengungsi Muslim meningkatkan risiko terorisme.

Salah satu faktor lain yang diperlihatkan Nathoo adalah bagaimana sifat konflik memengaruhi kebijakan pengungsi. Perang Ukraina dipersepsikan secara moral sebagai konflik antara demokrasi dan otoritarianisme. Negara-negara Barat dapat dengan mudah memihak Ukraina dan menciptakan narasi hitam-putih. Sebaliknya, konflik Suriah dianggap rumit: negara-negara harus memilih antara rezim Assad yang represif atau faksi pemberontak yang termasuk kelompok ekstremis. Kebingungan ini menghasilkan ambivalensi dalam kebijakan dan mempersulit penyusunan kerangka kerja kolektif dalam menangani pengungsi

Penelitian ketiga berjudul “Analisis Ketidapatuhan Polandia Terhadap *EU Relocation Scheme* Oleh Uni Eropa Dalam Krisis Pengungsi di Eropa Tahun 2015-2017” yang ditulis oleh Athira Nisrina Nurwansyah yang diterbitkan pada Juli 2022.

Penelitian membahas tentang Dampak Akibat Ketidakpatuhan Polandia Terhadap *EU Relocation Scheme* Oleh Uni Eropa Dalam Krisis Pengungsi di Eropa.

Eropa menghadapi gelombang pengungsian terbesar sejak Perang Dunia II akibat perang saudara di Suriah, konflik di Afghanistan, dan ketidakstabilan di Afrika Utara. Berdasarkan data UNHCR, lebih dari 1,3 juta orang mengajukan suaka di Uni Eropa (UE) sepanjang 2015–2016, dengan mayoritas memasuki wilayah Eropa melalui rute Mediterania Timur (Yunani) dan Tengah (Italia). Jerman, Swedia, dan Yunani menjadi negara tujuan utama, sementara negara-negara di Eropa Tengah dan Timur menolak kebijakan kuota pengungsi.

Sebagai solusi untuk mengurangi ketimpangan distribusi pengungsi, Komisi Eropa memperkenalkan EU Relocation Scheme pada September 2015. Program ini bertujuan merelokasi 160.000 pencari suaka dari Yunani dan Italia ke negara-negara anggota UE lainnya berdasarkan sistem kuota wajib yang mempertimbangkan faktor seperti PDB, populasi, dan tingkat pengangguran. Polandia, meskipun awalnya menyetujui skema ini, kemudian menolak untuk melaksanakannya. Hingga 2017, Polandia hanya menerima 0,1% dari total 6.182 pengungsi yang menjadi bagiannya dalam skema tersebut.

Penolakan Polandia terhadap EU Relocation Scheme mencerminkan tiga faktor utama: populisme nasionalis, skeptisisme terhadap Uni Eropa, dan konflik antara kedaulatan nasional serta integrasi Eropa. Krisis ini mengungkap tantangan mendasar dalam sistem tata kelola UE, di antaranya:

- a. Perlunya Reformasi Kebijakan Suaka: Skema kuota wajib dianggap kurang efektif, sehingga Uni Eropa harus mengembangkan mekanisme yang lebih adaptif dan berkeadilan.

- b. Penguatan Dialog Politik: Uni Eropa perlu melibatkan negara-negara anggotanya sejak tahap perumusan kebijakan guna mengurangi risiko penolakan.
- c. Pendidikan Publik: Melawan disinformasi dan xenofobia dengan menggalakkan kampanye yang mendukung integrasi.

Meskipun Polandia memperoleh keuntungan politik dengan menolak skema relokasi, keputusan ini justru memperburuk krisis legitimasi Uni Eropa dan mencoreng citranya sebagai pelopor hak asasi manusia di kancah internasional. Pada akhirnya, sikap Polandia menjadi contoh nyata akan tantangan dalam menjaga solidaritas di tengah perbedaan.

Penelitian ke empat berjudul “Pergeseran Kebijakan Integrasi Imigran Uni Eropa terhadap Imigran Timur Tengah-Afrika dan Ukraina” yang ditulis oleh Rizal Al Hamid yang diterbitkan pada 27 Mei 2022. Penelitian membahas tentang Dampak Pergeseran Kebijakan Integrasinya Imigran Uni Eropa Terhadap Imigran Timur Tengah-Afrika dan Ukraina.

Dalam dekade terakhir, Uni Eropa (UE) telah menghadapi dua gelombang migrasi besar: krisis pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika (2015–2017) serta eksodus warga Ukraina akibat invasi Rusia (2022–sekarang). Kedua situasi ini mendorong respons kebijakan yang berbeda dari UE, mencerminkan perubahan pendekatan terhadap integrasi imigran. Sementara pengungsi dari Suriah, Afghanistan, dan Afrika Utara sering kali dihadapkan pada regulasi ketat dan resistensi sosial, pengungsi Ukraina memperoleh penerimaan yang lebih cepat serta hak-hak khusus. Perbedaan perlakuan ini memunculkan diskusi mengenai faktor politik, budaya, dan hukum yang membentuk kebijakan integrasi di UE.

Perubahan dalam kebijakan integrasi UE mencerminkan dinamika kompleks yang dipengaruhi oleh faktor geopolitik, budaya, dan kepentingan ekonomi. Respons cepat terhadap pengungsi Ukraina menegaskan kemampuan UE dalam menunjukkan solidaritas, sementara perlakuan berbeda terhadap imigran dari Timur Tengah dan Afrika menyoroti kelemahan dalam sistem suaka serta integrasi di kawasan tersebut. Ke depan, UE perlu merancang kebijakan yang lebih inklusif, berlandaskan prinsip hak asasi manusia universal, bukan sekadar kedekatan geografis atau kesamaan budaya.

Penelitian kelima berjudul “Sekuritisasi Isu Migrasi di Polandia Pasca Krisis Pengungsi di Uni Eropa” yang ditulis oleh Mega Nisfa Makhroja yang diterbitkan pada 16 Januari 2020. Penelitian ini membahas tentang Dampak Sekuritisasi Isu Migrasi di Polandia Pasca krisis Pengungsi di Uni Eropa.

Krisis pengungsi di Uni Eropa (UE) pada 2015–2017, yang dipicu oleh konflik di Suriah, Afghanistan, dan Afrika Utara, menandai perubahan signifikan dalam kebijakan migrasi Eropa. Awalnya, Polandia sebagai anggota UE menyetujui skema relokasi pengungsi yang diusulkan oleh Komisi Eropa. Namun, setelah partai konservatif nasionalis PiS (*Law and Justice*) memenangkan pemilu pada 2015, sikap Polandia berubah drastis, menjadi salah satu negara yang paling menentang kebijakan migrasi UE. Pemerintahan PiS menerapkan narasi sekuritisasi migrasi, dengan menggambarkan arus pengungsi sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, untuk membenarkan penolakan terhadap pengungsi non-Eropa, terutama dari Timur Tengah dan Afrika. Pendekatan ini tidak hanya memengaruhi kebijakan dalam negeri tetapi juga memperburuk hubungan Polandia dengan UE. Fenomena ini menjadi contoh menarik tentang bagaimana isu migrasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan pembentukan identitas nasional.

Dampak jangka panjang mencakup:

- a. Krisis Demografi: Penolakan terhadap migran non-Ukraina semakin memperparah tantangan demografi akibat penuaan populasi di Polandia.
- b. Isolasi di UE: Polandia berpotensi mengalami penurunan pengaruh dalam proses perumusan kebijakan di Uni Eropa.
- c. Dualisme Kebijakan: Diperlukan penyesuaian kembali kebijakan migrasi agar lebih adil dan bebas dari diskriminasi.

Polandia mencerminkan tren global dalam menjadikan isu migrasi sebagai alat politik untuk meraih dukungan domestik, meskipun sering mengesampingkan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Penelitian ke enam berjudul “Implikasi Kebijakan Penerimaan Pengungsi terhadap Pembentukan Pandangan Baik bagi Jerman dan Eropa” yang ditulis oleh Fauzi Firmansyah. yang diterbitkan pada tahun 2013. Penelitian ini membahas tentang Kebijakan Penerimaan Pengungsi terhadap Pembentukan Pandangan Baik bagi Jerman dan Eropa.

Kebijakan penerimaan pengungsi Jerman, yang dikenal sebagai *Flüchtlingspolitik*, telah menjadi salah satu isu paling kontroversial sekaligus strategis dalam politik domestik dan hubungan internasional negara tersebut. Artikel ini menganalisis bagaimana kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai respons kemanusiaan, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk ulang identitas nasional Jerman pasca-Perang Dunia II. Kebijakan tersebut dijalankan dengan tujuan merekonstruksi citra Jerman dari "negara antagonis" menjadi "negara yang bertanggung jawab secara moral", terutama melalui penerimaan pengungsi dari kawasan konflik seperti Suriah, Afghanistan, dan Irak.

Sejak 1948, Jerman telah merumuskan kebijakan pengungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas kekejaman Holocaust. Kebijakan ini awalnya difokuskan pada penyediaan suaka bagi korban Holocaust dan keluarga mereka. Namun, pada tahun 2015, kebijakan tersebut berkembang menjadi respon terhadap krisis pengungsi Timur Tengah, yang dipicu oleh konflik berkepanjangan di Suriah.

Kebijakan Jerman mendapat pujian dari negara-negara Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Tiongkok, misalnya, meningkatkan kepercayaan terhadap Uni Eropa dalam kerja sama perdagangan setelah melihat stabilitas Jerman. Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Obama, juga mengapresiasi transformasi Jerman dari "negara perang" menjadi "negara kemanusiaan".

Kebijakan penerimaan pengungsi Jerman adalah contoh kompleksitas hubungan antara politik identitas, tanggung jawab historis, dan realitas global. Meski menghadapi tantangan berat, kebijakan ini menawarkan pelajaran berharga tentang bagaimana negara bisa menggunakan instrumen kebijakan untuk membentuk narasi nasional yang transformatif. Keberlanjutannya akan bergantung pada kemampuan Jerman (dan Eropa) untuk mengatasi masalah integrasi, menjaga keamanan, dan mempertahankan solidaritas dalam konteks geopolitik yang semakin tidak pasti.